

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

| | | |
|---------|----------|------------|
| Kompas | Sindo | Tempo |
| Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DKI Usulkan Pendapatan Naik

Kenaikan Sejumlah Tarif Pajak Sedang Dikaji

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan pendapatan asli daerah 2018 sebesar Rp 2,87 triliun. Kenaikan tarif pajak menjadi salah satu instrumen yang akan ditingkatkan. DPRD DKI meminta agar peningkatan target penerimaan ini tidak membebani rakyat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD DKI dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2018, Kamis (16/11).

Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) ini untuk memenuhi anggaran belanja daerah 2018 yang mencapai Rp 77,05 triliun.

Sesuai kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa lalu, APBD DKI 2018 disepakati Rp 77,05 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp 5,16 triliun atau 7,17 persen dari APBD-P 2017 yang ditetapkan Rp 71,89 triliun.

Pada PAD, Pemprov DKI memproyeksi penerimaan pajak daerah naik menjadi Rp 38,12 triliun. Sebelumnya, seperti diusulkan di Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penerimaan pajak ditargetkan Rp 36 triliun. Dokumen KUA-PPAS yang disepakati eksekutif dan legislatif menjadi dasar pembahasan RAPBD.

Dibandingkan APBD Perubahan 2017, target penerimaan

pajak di RAPBD 2018 meningkat Rp 2,76 triliun atau 7,82 persen.

William Yani dari Fraksi PDI-P berpendapat, peningkatan penerimaan pajak akan menambah beban wajib pajak.

Santoso, anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, mengatakan, target peningkatan penerimaan pajak daerah sebaiknya tidak diikuti kenaikan tarif.

Ia meminta pemerintah membuat terobosan untuk meningkatkan pendapatan. Terobosan itu bisa berupa optimalisasi mengurangi kebocoran pajak dan menjangkau wajib pajak yang belum tersentuh. Dengan demikian, target menaikkan pajak ini tidak membebani rakyat yang sudah membayar pajak.

"Adalah prestasi bila tidak ada kenaikan tarif, tetapi pendapatan naik. Kalau pendapatan naik karena ada kenaikan tarif, itu bukan prestasi," kata Santoso.

Pajak naik

Dari pembahasan di Banggar, peningkatan target penerimaan pajak daerah disertai kenaikan beberapa tarif pajak daerah. Persentase penghitungan pajak parkir, misalnya, diusulkan naik. Saat ini, pajak parkir 20 persen dari

pendapatan pengelola tempat parkir. Nantinya, pajak parkir diusulkan 30 persen dari pendapatan pengelola.

Selain itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diusulkan naik dari 10 persen menjadi 15 persen dari nilai kendaraan. Adapun pajak penerangan jalan naik dari 2,6 persen menjadi 6 persen dari tagihan listrik warga. PBB zona komersial juga diusulkan naik.

Michael Rolandi Cesnand Brata, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI, menjelaskan, peningkatan target penerimaan akan diikuti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak di antaranya dengan memasang stiker atau plang di aset penunggak pajak.

Selain itu, akan ada upaya mengkaji perubahan tarif pajak. Dari 13 jenis pajak kendaraan, ujar Michael, akan ada perubahan tarif. "Namun, tidak semua ada perubahan," katanya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, optimalisasi pajak yang dimaksud adalah melakukan penagihan penunggakan pajak. "Penunggak pajak harus ditagih. Itu adalah piutang jadi harus ditagih. Angka tunggakan juga cukup signifikan," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi pertanyaaan Dewan dalam rapat ini.

"Senin (20/11), kami akan menyampaikan jawaban lengkap atas semua pertanyaan dan program-program prioritas kami," katanya. (HLN)

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | |
|---------|----------|------------|
| Kompas | Sindo | Tempo |
| Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DKI Usulkan Pendapatan Naik

Kenaikan Sejumlah Tarif Pajak Sedang Dikaji

